

## DAFTAR RUJUKAN

### 1. Buku

- Ahmad, Mustofa dan Beni Ahmad Subeni. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, Abu Abdul Halim. 1996. *Suap Dampak dan Bahayanya Tinjauan Syar'i dan Sosial*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Andi Hamzah. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arsyad, Jawade Hafidz. 2013. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ermansyah, Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gadjong, Agus Salim Andi. 2004. *Pemerintahan Kajian Politik dan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Ali, 2009. *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mappiare, Andi AT. 2009. *Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*. Malang: Janggala Pustaka Utama.
- Muhammad, 2017. *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*. Makasar: Edukasi Mitra Grafika.
- Moleong, Lexi J., 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Sanapiah, Faizal. 1999. *Format Penelitian Sosial*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Ibnu. 2011. *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Yogyakarta: Gava Media.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Jakarta: Revlika Aditama.
- Sirajuddin dan Anis Ibrahim., ect. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press.
- Subagyo, Joko 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suyanto, 2005. *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Syahatah, Husain. 2008. *Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syariah*. cet. Ke 2. Jakarta: Sinar Grafika Offser.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Wiyono, R, 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **2. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

## **3. Karya Tulis Ilmiah**

Azmi, Muhammad Ulul, 2006. *Pilkades dan Risywah dalam Perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyah (Studi di Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Tahun 2006)*. Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan.

- Barama, Michael. 2004. *Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah*. Jurnal Hukum UNSRAT. Vol. 22/No.5/Januari.
- Duaji, Noverman. 2012. *Good Governance dalam Pemerintahan Daerah*. Jurnal MIMBAR. Vol. 28/No. 2/Desember.
- Farid, Mifta. 2017. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah*. e-Journal Lentera Hukum. Vol.4/No.2/Maret.
- Fatkuri, 2017. *Korupsi Dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya*”, Jurnal: Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial. Vol. 1/No. 2/Januari.
- Fazzan, 2015. *Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol./14/No.2/Februari.
- Ka’bah, Rifyal. 2010. *Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol./1 No.1/Januari- Maret.
- Maulana, Zefri. 2016. *Persepsi Masyarakat terhadap Faktor-Faktor yang mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)*. Jurnal Manajemen dan Keuangan. Vol.5/No.2/November.
- Muhammad Nurul Arifin. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. TK: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Paturusi, Azharul Nugraha Putra. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/PidSus.TPK/2015/PN.Mks)*. Skripsi: tidak diterbitkan.
- Saldi, Rafli. 2017. *Analisis Korupsi dan Dampaknya (Telaah Atas Hukum Islam)*. Makassar: Skripsi tidak diterbitkan.

- Santoso, Amir. 2008. *Faktor-Faktor Politik, Administrasi, dan Budaya Dalam Masalah Korupsi di Indonesia*. Jurnal JKAP. Vol.11/No. 1/Mei.
- Sari, 2015. *Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi*. Jurnal Hukum. Vol. 1/No. 2/ Januari.
- Septian, Jimmy. 2018. *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak-Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)*. Skripsi tidak diterbitkan.
- Sina, La. 2018. *Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol.26/No.1/Januari.
- Soemanto RB. et. Al. 2014. *Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi*. Jurnal. Yustisia. Vol. 31/No.1/JanuariApril.
- Srinita, 2016. *Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan*. Jurnal Kajian Politik Dan Maslah Pembangunan. Vol. 12/No. 02.Mei.
- Syamsudin, M.. 2008. *Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum*. Jurnal: UNISIA. Vol. 3/No. 64/Juni .
- Trisusanti Lamangida. 2018. *Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango*, Jurnal Ilmu Administrasi. Vol. 6/No. 2/Januari.
- Umam, M. Helmi 2013. *Pandangan Islam Tentang Korupsi*. Jurnal Teosofi Tasawuf dan Pemikiran Islam. Vol. 3/No.2/Desember.
- Wahib, Sulhan 2014. *Studi Komparasi Antara Hibah dan Risywah Menurut Pandangan Pemuka Agama Islam di Kecamatan Rejotang Kabupaten Tulungagung*. Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan.

- Warjiyati. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik*. Jurnal Hukum Islam. Vol. 18/No. 1/Juni.
- Wawan Trans Pujiyanto, 2015. *Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol.3/ No.2/September.
- Yunus, Nur Rohim. 2016. *Menciptakan Good Governance and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia*. Jurnal Nur El- Islam. Vol 3/No. 1/April.

#### **4. Website**

Detiknews, *Jejak Kasus Korupsi Mendera Malang Raya Bertubi-tubi* dalam [www.m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4248163/jejak-kasus-korupsi-mendera-malang-roya-bertubi-tubi](http://www.m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4248163/jejak-kasus-korupsi-mendera-malang-roya-bertubi-tubi), di akses pada 12 Januari 2019 pukul 22.00 WIB.